# **MAKALAH SELEKSI TERBATAS**

# STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF DAN MASYARAKAT KABUPATEN KUPANG YANG SEJAHTERA MENUJU VISI KABUPATEN KUPANG EMAS

Disusun Oleh:

Delsi A. Panie, S.Kom.,MM 197712092009032005

Diajukan sebagai Persyaratan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kupang

KUPANG, 22 Oktober 2025

# Target 1: Digitalisasi Layanan Publik KERANGKA PEMIKIRAN MAKALAH Tiga Target Strategis Utama (2025-2029) Target 2: Penurunan Hoaks Target 3: Peningkatan Literasi Digital Kesenjangan Infrastruktur TIK Analisis Kondisi dan Tantangan Keterbatasan SDM dan Kapasitas Digital Silo System Pemerintahan (SPBE) Roadmap Transformasi Digital (Fondasi SPBE) Kolaborasi Multipihak (Triple Helix/KPBU) Pilar Program dan Implementasi Kunci Pengembangan Layanan Inovatif (Smart Region) Strategi Transformasi Digital Diskominfo Kab. Kupang (Visi EMAS) Monitoring dan Evaluasi (SMART Framework) Pemberdayaan Ekonomi Digital Peningkatan IPM dari 70 menjadi 75+ (Kategori Tinggi) Penurunan Tingkat Kemiskinan dari 28% menjadi 18% Dampak Jangka Panjang (Visi EMAS) Peningkatan Indeks SPBE dari 2.0 menjadi 3.5+ (Sangat Baik) Kabupaten Kupang Top 10 Nasional Indeks Smart Region Landasan Yuridis Landasan Hukum dan Teoritis Landasan Teoritis

# **DAFTAR ISI**

STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF DAN MASYARAKAT	
KABUPATEN KUPANG YANG SEJAHTERA MENUJU VISI KABUPATEN KUPANG	
EMAS	1
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
KATA PENGANTAR	4
EXECUTIVE SUMMARY	5
A. Analisis Kondisi dan Tantangan	5
B. Tiga Target Strategis Utama (2025–2029)	5
C. Pilar Program dan Implementasi Kunci	6
D. Dampak Jangka Panjang	6
BAB I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kegunaan Penulisan1	0
BAB II. LANDASAN YURIDIS DAN TEORITIS1	1
A. Landasan Yuridis dan Konstitusional1	1
B. Landasan Pustaka dan Teoritis1	2
BAB III. PEMBAHASAN1	4
A. Isu Strategis terhadap Visi dan Misi Kabupaten Kupang EMAS1	4
B. Analisis Isu Strategis dan <i>Output/Outcome</i> Terukur	5
C. Rencana Strategis Pencapaian Target Visi dan Misi (2025–2029)1	5

$\mathbf{B}$	AB IV. PENUTUP	.45
A.	Kesimpulan	45
В.	Rekomendasi Kebijakan	.45
DAF	TAR PUSTAKA	.47

# **DAFTAR TABEL**

EXCECUTIVE SUMMARY 1 TIGA TARGET STRATEGIS UTAMA (2025–2029)	5
TABEL 3 1 ANALISIS ISU STRATEGIS DAN OUTPUT/OUTCOME TERUKUR	15
TABEL 3 2 TAHAPAN PENYUSUNAN ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN KUPANG	16
TABEL 3 3 PROGRAM PRIORITAS 5 DIMENSI SMART REGION	20
TABEL 3 4 ROADMAP DIGITALISASI LAYANAN	23
Tabel 3 5 Indikator Output	23
Tabel 3 6 Indikator Outcome	24
TABEL 3 7 ROADMAP PENURUNAN HOAKS	26
Tabel 3 8 Indikator Output	27
Tabel 3 9 Indikator Outcome	27
TABEL 3 10 ROADMAP PENINGKATAN LITERASI DIGITAL	31
Tabel 3 11 Indikator Output	32
Tabel 3 12 Digital Skills	32
Tabel 3 13 Digital Ethics	33
Tabel 3 14 Digital Safety	33
Tabel 3 15 Digital Culture	33
TAREL 3 16 OUTPUT DAN OUTCOME TERUKUR	42

**KATA PENGANTAR** 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Makalah Strategi

Transformasi Digital ini dapat diselesaikan. Makalah ini disusun sebagai pemenuhan persyaratan dalam

proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk posisi Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kupang.

Dokumen ini merupakan wujud komitmen dan visi strategis saya untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang adaptif dan masyarakat yang sejahtera di Kabupaten Kupang, sejalan dengan visi

besar "Kabupaten Kupang EMAS". Strategi yang diuraikan didasarkan pada analisis mendalam

terhadap kondisi geografis, demografis, dan infrastruktur TIK eksisting, serta merumuskan solusi

berbasis teknologi untuk menjawab tantangan fundamental daerah, seperti kesenjangan digital,

kemiskinan, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Makalah ini tidak hanya menyajikan rencana program, tetapi juga menyertakan kerangka pengukuran

output dan outcome yang ketat, kolaborasi multipihak yang terstruktur, dan mekanisme perbaikan

berkelanjutan. Diharapkan, dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pimpinan daerah dalam

mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Gerakan Menuju

Smart Region di Kabupaten Kupang.

Akhir kata, saya menyadari makalah ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Kritik dan saran

yang konstruktif sangat diharapkan demi tercapainya tujuan pembangunan TIK yang optimal di

Kabupaten Kupang.

Kupang, Oktober 2025

Delsi A. Panie, S.Kom., MM

197712092009032005

# **EXECUTIVE SUMMARY**

Makalah Strategi Transformasi Digital ini berfungsi sebagai peta jalan terukur bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kupang untuk menjadi **akselerator utama** dalam mencapai visi **"Kabupaten Kupang EMAS"** melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

## A. Analisis Kondisi dan Tantangan

Kabupaten Kupang, dengan populasi 355.000 jiwa yang tersebar luas, menghadapi tantangan struktural yang kompleks, terutama dalam konteks digitalisasi:

- 1. **Kesenjangan Infrastruktur TIK:** Meskipun terdapat 137 titik akses internet program BAKTI, *bandwidth* per titik (4 Mbps) dinilai tidak memadai dan koneksi sering terganggu. Ini menciptakan **kesenjangan digital** yang menghambat pemerataan akses.
- 2. **Keterbatasan SDM dan Kapasitas Digital:** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata nasional dan rendahnya **literasi digital** masyarakat menjadi hambatan dalam adopsi layanan digital pemerintah.
- 3. *Silo System* Pemerintahan: Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum terintegrasi, ditandai dengan banyaknya aplikasi yang tumpang tindih (*silo system*), yang berujung pada inefisiensi birokrasi dan pemborosan anggaran.

# B. Tiga Target Strategis Utama (2025–2029)

Strategi yang diusulkan Diskominfo berfokus pada tiga target terukur yang saling mendukung:

Excecutive Summary 1 Tiga Target Strategis Utama (2025–2029)

Target Strategis	Definisi Kunci	Target Kuantitatif Jangka
		Panjang
Target 1: Digitalisasi Layanan	Mewujudkan tata kelola	90% layanan publik dapat
Publik	pemerintahan yang transparan	diakses digital pada Tahun
	dan efisien.	2028.
Target 2: Penurunan Hoaks	Menciptakan ekosistem	Menurunkan penyebaran hoaks
	informasi yang sehat dan kritis.	sebesar 40% per tahun (dari
		tahun sebelumnya).
Target 3: Peningkatan Literasi	Meningkatkan kapasitas SDM	80% masyarakat memiliki
Digital	lokal dan inklusi sosial.	literasi digital tingkat baik
		(>3.0) pada <b>Tahun 2029</b> .

# C. Pilar Program dan Implementasi Kunci

Rencana strategis diwujudkan melalui lima pilar program utama:

- 1. Roadmap Transformasi Digital (C.1): Fokus pada penyusunan Arsitektur SPBE 7 Domain, konsolidasi aplikasi ke dalam Portal Kupang Digital (Single Sign-On), dan percepatan digitalisasi layanan prioritas (Quick Wins).
- 2. Kolaborasi Multipihak (C.2): Mengimplementasikan model *Triple Helix* melalui Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk penguatan infrastruktur, sinergi dengan BAKTI untuk peningkatan *bandwidth* (target 10 Mbps per titik), dan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk program Duta Digital.
- 3. Pengembangan Layanan Inovatif (C.3): Mengembangkan konsep Smart Region dengan Command Center terintegrasi, aplikasi super-apps "KUPANG DIGITAL", serta program Smart Economy (digitalisasi 5.000 UMKM) dan Smart Living (Telemedicine).
- 4. Monitoring dan Evaluasi (C.4): Menerapkan *SMART Framework* dengan **Dashboard** Monitoring Kinerja *real-time*, Survei Kepuasan Pengguna (*CSAT, NPS*), dan Survei Literasi Digital tahunan (*Annual Survey*).
- 5. Pemberdayaan Ekonomi Digital (C.5): Membangun Kupang Digital Hub sebagai inkubator *startup* lokal dan penyediaan akses pembiayaan digital, dengan target penciptaan 1.000 lapangan kerja di sektor TIK pada 2029.

# D. Dampak Jangka Panjang

Strategi terpadu ini ditargetkan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan daerah:

- Peningkatan **IPM** dari 70 menjadi **75**+ (Kategori Tinggi).
- Penurunan tingkat **kemiskinan** dari 28% menjadi **18%**.
- Peningkatan Indeks SPBE dari 2.0 (Kurang) menjadi 3.5+ (Sangat Baik).
- Kabupaten Kupang menjadi **Top 10 Nasional** dalam indeks *Smart Region*.

# **BAB I. PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kunci dalam transformasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi sosial di era 4.0. Sebagai daerah strategis di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang memiliki tantangan dan peluang besar untuk memanfaatkan teknologi guna mewujudkan *good governance* dan masyarakat yang sejahtera.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pimpinan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kupang wajib berkontribusi aktif terhadap pencapaian visi "Menuju Kabupaten Kupang EMAS" melalui penguatan sektor komunikasi, peningkatan literasi digital, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Seluruh rencana strategis dan inovasi yang diusulkan bersandar pada misi utama, yaitu "Mewujudkan masyarakat Kabupaten Kupang yang unggul di berbagai sektor demi tercapainya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat," sebagaimana ditegaskan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2024-2029.

Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya literasi digital, penyebaran informasi yang tidak merata, serta maraknya hoaks. Meskipun demikian, ada peluang besar dari program digitalisasi nasional, percepatan layanan publik berbasis elektronik, dan visi Kabupaten Kupang EMAS.

Kondisi yang diharapkan adalah sistem layanan informasi publik yang cepat, akurat, dan transparan, digitalisasi birokrasi yang terintegrasi, serta masyarakat yang cakap dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini membutuhkan kepemimpinan yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif dari Dinas Kominfo.

#### Kondisi Saat Ini dan Tantangan

Berdasarkan data yang ada, beberapa poin penting dapat disoroti:

 Demografi dan Ekonomi: Dengan populasi sekitar 355.000 jiwa yang tersebar di wilayah pedesaan, tantangan utama adalah memastikan akses teknologi merata ke seluruh penduduk. Tingginya angka kemiskinan (28,08%) menunjukkan bahwa solusi digital harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, bukan hanya sekadar konektivitas.

- Pendidikan dan SDM: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah ratarata nasional dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan serius. Transformasi digital tidak akan efektif jika masyarakatnya belum siap.
- Infrastruktur TIK: Meskipun ada 137 titik internet satelit dari program BAKTI, bandwidth per titik yang terbatas (4 Mbps) dan seringnya koneksi lambat menjadi kendala utama. Akses internet belum merata, terutama di kawasan terpencil. Meskipun listrik sudah menjangkau sebagian besar wilayah, infrastruktur TIK masih menjadi PR besar.
- Layanan Pemerintahan: Layanan digital pemerintah (SPBE) masih dalam tahap pengembangan. Keterbatasan pada aplikasi, pusat data, dan jaringan intra menunjukkan perlunya investasi dan koordinasi yang lebih kuat.

#### Peluang dan Strategi

Meskipun tantangan yang ada sangat kompleks, Kabupaten Kupang memiliki peluang besar untuk memanfaatkan teknologi. Beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan adalah:

#### • Penguatan Infrastruktur:

- Mendorong program pemerintah pusat untuk meningkatkan bandwidth dan kualitas koneksi internet di titik-titik BAKTI.
- Mencari kerja sama dengan penyedia layanan internet swasta (ISP) untuk memperluas jangkauan jaringan di wilayah yang belum terakses.
- Mengembangkan jaringan intra-pemerintah yang stabil dan aman untuk mendukung SPBE.

#### • Peningkatan Literasi Digital:

- Mengadakan program pelatihan literasi digital secara berkala dan masif, khususnya bagi masyarakat pedesaan, UMKM, dan aparatur desa.
- Melibatkan komunitas kreatif dan kaum muda sebagai duta digital untuk menyebarkan informasi dan pelatihan.
- Berkoordinasi dengan perguruan tinggi setempat untuk mengembangkan kurikulum dan program yang relevan dengan kebutuhan digitalisasi.

#### • Pemanfaatan Teknologi untuk Kesejahteraan:

- o Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang berfokus pada peningkatan ekonomi lokal, seperti *e-commerce* untuk produk pertanian atau kerajinan.
- Memanfaatkan data untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya penurunan angka kemiskinan.
- Membangun sistem informasi publik yang transparan untuk mengurangi hoaks
   dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### • Kolaborasi dan Tata Kelola:

- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
- Memanfaatkan insentif dari pemerintah pusat untuk mempercepat transformasi digital.
- Mengimplementasikan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif untuk mengarahkan seluruh upaya digitalisasi.

Transformasi digital di Kabupaten Kupang adalah perjalanan yang kompleks, namun dengan strategi yang tepat, potensi besar untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera dapat tercapai.

# B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tiga pertanyaan strategis dirumuskan sebagai fokus pembahasan makalah:

- 1. Bagaimana strategi Diskominfo Kabupaten Kupang dalam membangun **Arsitektur SPBE** yang terintegrasi dan mengatasi *silo system* antar-OPD untuk mencapai target 90% layanan publik diakses digital pada Tahun 2028?
- 2. Apa kerangka kerja kolaborasi (*Triple Helix* dan KPBU) yang efektif untuk mengoptimalkan infrastruktur TIK (peningkatan *bandwidth* BAKTI) dan memperkuat kapasitas SDM dalam rangka mewujudkan *Smart Region* lokal?
- 3. Bagaimana merancang program **Peningkatan Literasi Digital** yang terukur (mencapai 80% masyarakat) dan sistem mitigasi **Penurunan Hoaks** (40% per tahun) sebagai instrumen untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan *good governance*?

# C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu strategis:

Horizon Waktu	Tujuan Kuantitatif	Tujuan Kualitatif
Jangka Pendek (Tahun 1–2:	Menyusun Dokumen	Membangun fondasi Smart
2025–2026)	Arsitektur SPBE dan Peta	Region dan War Room Anti
	Rencana SPBE 2025-2029.	Hoaks untuk respons cepat.
Jangka Menengah (Tahun 3–4:	Mencapai 70% layanan digital	Mengintegrasikan aplikasi
2027–2028)	dan meningkatkan Indeks	prioritas ke dalam Portal
	SPBE menjadi kategori Baik	Kupang Digital (Single Sign-
	(3.0).	On) dan mereplikasi Quick
		Wins.
Jangka Panjang (Tahun 5:	Mencapai target 90% layanan	Mewujudkan tata kelola
2029)	digital dan 80% literasi digital	pemerintahan yang adaptif dan
	masyarakat.	masyarakat yang <b>sejahtera</b>
		melalui ekosistem digital yang
		mandiri, selaras dengan Visi
		Kabupaten Kupang EMAS.

# D. Kegunaan Penulisan

Makalah ini diharapkan memberikan kegunaan pada empat aspek utama:

- 1. **Kegunaan Manajerial/Operasional:** Sebagai **Peta Jalan** (*Roadmap*) yang jelas, terukur, dan berbasis data bagi Kepala Diskominfo dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), memastikan program kerja selaras dengan visi pimpinan daerah.
- 2. **Kegunaan Kebijakan/Regulasi:** Memberikan landasan teoretis dan praktis untuk mengusulkan **Peraturan Bupati** tentang Arsitektur SPBE dan Satu Data Indonesia, yang krusial untuk mencegah *silo system* dan pemborosan anggaran TIK.
- 3. **Kegunaan Kemitraan:** Menjadi **Dokumen Advokasi** yang kredibel untuk menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Swasta (melalui skema KPBU dan CSR), dan Perguruan Tinggi (untuk penguatan SDM).
- 4. **Kegunaan Akademis/Ilmiah:** Mendokumentasikan *best practice* dan model transformasi digital di tingkat Kabupaten/Kota, khususnya dalam konteks *Smart Region* di wilayah kepulauan/pedesaan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia Timur.

# BAB II. LANDASAN YURIDIS DAN TEORITIS

### A. Landasan Yuridis dan Konstitusional

Implementasi Transformasi Digital Diskominfo Kabupaten Kupang harus memiliki pijakan hukum yang kuat dan berjenjang. Pijakan ini memastikan bahwa seluruh program bersifat akuntabel dan selaras dengan kebijakan nasional.

#### 1. Dasar Konstitusional dan Integritas:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). (Relevansi: SPBE dan Layanan Digital bertujuan meningkatkan transparansi dan mencegah KKN.)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (*Relevansi: Digitalisasi layanan adalah instrumen utama pemenuhan standar pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau.*)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Relevansi: Portal Informasi Publik dan Open Data Portal merupakan mandat untuk menjamin hak masyarakat atas informasi.)

#### 2. Dasar Hukum TIK dan Transaksi Elektronik:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. (Relevansi: Mengatur legalitas transaksi digital, komunikasi publik, dan sanksi hukum terhadap penyebaran hoaks.)
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (*Relevansi: Menjadi panduan teknis pengelolaan sistem elektronik pemerintah.*)

#### 3. Dasar Hukum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):

- Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (Relevansi: Mandat nasional untuk integrasi tata kelola dan layanan digital pemerintah.)
- Peraturan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional.
   (Relevansi: Menetapkan panduan wajib bagi daerah untuk menyusun Arsitektur SPBE 7
   Domain, menjadi dasar perencanaan program TIK Diskominfo.)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
   Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. (Relevansi: Memastikan Roadmap Transformasi Digital Diskominfo terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Kupang.)

#### 4. Dasar Hukum Data dan Infrastruktur:

- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Relevansi: Menjadi landasan untuk konsolidasi data antar-OPD dan pembangunan Data Center yang terintegrasi.)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Relevansi: Memberikan kewenangan otonomi kepada Diskominfo dalam pengelolaan urusan komunikasi dan informatika.)

**Kesimpulan Yuridis:** Seluruh program Diskominfo, mulai dari penyusunan Arsitektur SPBE, pembangunan Portal Digital, hingga program Literasi Digital, memiliki dukungan hukum yang kokoh dari tingkat konstitusi hingga peraturan presiden.

#### B. Landasan Pustaka dan Teoritis

Landasan teoretis memberikan kerangka berpikir yang kokoh untuk merancang strategi yang efektif dan berkelanjutan.

#### B.1. Konsep Good Governance dan Adaptive Governance

- Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik): Konsep ini dianut oleh PBB dan Bank Dunia, yang menekankan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dan Efisiensi.
   Transformasi digital adalah instrumen utama untuk mengimplementasikan good governance.
   Layanan digital (e-service) meningkatkan efisiensi, sementara Open Data Portal menjamin transparansi dan akuntabilitas.
- Adaptive Governance (Tata Kelola Adaptif): Dalam konteks TIK yang cepat berubah (era cloud computing, AI, Big Data), pemerintah harus mampu beradaptasi dan merespons perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat secara cepat. Strategi Diskominfo harus fleksibel (agile) dan memungkinkan continuous improvement. Model Adaptive Governance diterapkan melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Check-Act) yang rutin (Bab III.C.4).

#### **B.2.** Teori Transformasi Digital Pemerintahan (SPBE)

Transformasi digital melampaui sekadar mengotomatisasi proses lama (*e-government* tahap awal). Ia adalah perubahan fundamental pada cara pemerintah beroperasi dan memberikan nilai kepada masyarakat.

- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): SPBE, sesuai Perpres 95/2018, adalah implementasi komprehensif dari Transformasi Digital di Indonesia. Intinya adalah Integrasi total yang mencakup:
  - o Tata Kelola SPBE: Penyusunan Arsitektur, Peta Rencana, dan Manajemen Risiko.
  - Manajemen SPBE: Manajemen data, aplikasi, dan infrastruktur.

- o Layanan SPBE: Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik.
- Mitigasi Silo System: Kegagalan terbesar e-government di masa lalu adalah silo system. Solusi SPBE adalah konsolidasi aplikasi, data sharing melalui API Gateway, dan pembangunan middleware untuk interoperabilitas. Konsep Satu Data Indonesia adalah kunci keberhasilan SPBE.

#### B.3. Model Smart City dan Smart Region

- *Smart City* (Kota Cerdas): Konsep yang memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi layanan, dan daya saing. Diskominfo akan mengadopsi model Gerakan Menuju *Smart City* (KemenPANRB/Komdigi) dengan 5 dimensi: *Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment*, dan *Smart Mobility*.
- Smart Region (Kawasan Cerdas): Untuk Kabupaten Kupang yang memiliki wilayah luas dengan populasi tersebar, konsep Smart Region lebih relevan. Fokusnya bergeser dari kepadatan kota ke keterhubungan antar-desa/kecamatan, inklusivitas, dan pemanfaatan TIK untuk sektor primer (pertanian, perikanan, pariwisata). Program seperti Telemedicine dan Digitalisasi UMKM di desa adalah manifestasi Smart Region.

#### B.4. Pilar Literasi Digital dan Komunikasi Pembangunan

- 4 Pilar Literasi Digital: Program Literasi Digital harus mengacu pada kerangka yang ditetapkan Komdigi:
  - 1. Digital Skills: Kemampuan teknis menggunakan perangkat dan aplikasi.
  - 2. Digital Ethics: Etika berinteraksi di ruang digital (anti-hoaks, cyberbullying).
  - 3. Digital Safety: Kesadaran keamanan siber dan perlindungan data pribadi.
  - 4. *Digital Culture:* Memanfaatkan TIK untuk kreativitas dan produktivitas (ekonomi digital).
- Teori Komunikasi Pembangunan: TIK digunakan sebagai saluran untuk menyebarkan informasi pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat (*e-participation*), dan mengubah perilaku ke arah yang lebih positif (misalnya, menekan penyebaran hoaks). Peran Diskominfo adalah mengubah komunikasi dari satu arah (pemerintah ke publik) menjadi dua arah dan dialogis (Bab III.C.3.4).

# **BAB III. PEMBAHASAN**

## A. Isu Strategis terhadap Visi dan Misi Kabupaten Kupang EMAS

Isu-isu strategis yang dihadapi Diskominfo Kabupaten Kupang diidentifikasi berdasarkan analisis SWOT dan dikaitkan langsung dengan Visi **"Kabupaten Kupang EMAS"** (Unggul, Mandiri, Adaptif, dan Sejahtera).

## 1. Isu Infrastruktur: Kesenjangan Akses dan Kualitas TIK

- Tantangan: Keterbatasan bandwidth BAKTI (4 Mbps) dan banyaknya blank spot.
- Dampak Visi EMAS: Menghambat aspek Unggul (pendidikan digital) dan Mandiri (ekonomi digital di desa). Layanan digital tidak akan berfungsi tanpa infrastruktur dasar yang kuat.
- Arah Strategis: Penguatan infrastruktur dasar melalui skema KPBU dan kolaborasi sinergi BAKTI (Bab III.C.2).

#### 2. Isu Tata Kelola: Fragmentasi Sistem dan Rendahnya Indeks SPBE

- Tantangan: Silo system aplikasi, duplikasi anggaran, dan ketidakselarasan proses bisnis antar-OPD.
- **Dampak Visi EMAS:** Menghambat aspek **Adaptif** (pemerintahan tidak responsif) dan efisiensi anggaran. *Good governance* tereduksi karena akuntabilitas dan transparansi terpecah.
- Arah Strategis: Penyusunan Arsitektur SPBE 7 Domain dan pembangunan Portal Kupang Digital (Bab III.C.1).

#### 3. Isu SDM dan Masyarakat: Literasi Digital dan Ancaman Hoaks

- Tantangan: Rendahnya IPM dan Literasi Digital (skor ±2.5). Penyebaran hoaks yang tinggi mengurangi kepercayaan publik.
- Dampak Visi EMAS: Menghambat aspek Unggul (SDM tidak kompetitif) dan Sejahtera (ancaman penipuan digital dan konflik sosial). Masyarakat tidak siap menerima layanan digital.
- Arah Strategis: Program Literasi Digital Masif (4 Pilar) dan implementasi War Room Anti Hoaks (Bab III.C.4).

#### 4. Isu Ekonomi: Belum Terintegrasinya Potensi Lokal ke Ekosistem Digital

- **Tantangan:** Potensi UMKM dan sektor pertanian/pariwisata belum terintegrasi dengan platform *e-commerce* dan *fintech*.
- Dampak Visi EMAS: Menghambat aspek Mandiri dan Sejahtera. Ekonomi lokal tidak mendapatkan nilai tambah dari teknologi, dan angka kemiskinan sulit ditekan.
- Arah Strategis: Pembangunan Kupang Digital Hub dan platform UMKM DIGITAL

#### KUPANG (Bab III.C.5).

# B. Analisis Isu Strategis dan Output/Outcome Terukur

Isu strategis harus dikonversi menjadi *Output* (hasil langsung program) dan *Outcome* (perubahan perilaku/kondisi yang lebih luas) yang dapat diukur, sejalan dengan ketiga Target Strategis Diskominfo.

Tabel 3 1 Analisis Isu Strategis dan Output/Outcome Terukur

Isu Strategis	Program Kunci	Output Terukur	Outcome Terukur
		(Jangka Pendek)	(Jangka Panjang 2029)
<b>Isu 1:</b> Kesenjangan	Kolaborasi Sinergi	Peningkatan bandwidth	Ketersediaan Jaringan
Infrastruktur &	BAKTI & Skema	BAKTI (min. 10	4G/5G merata di 80%
Kualitas Koneksi	KPBU	Mbps); 2 Proyek KPBU	wilayah berpenduduk.
		TIK diinisiasi.	
Isu 2: Fragmentasi	Penyusunan Arsitektur	Dokumen Arsitektur	Indeks SPBE 3.5+
Sistem & Indeks SPBE	SPBE & Konsolidasi	SPBE disahkan Perbup;	(Sangat Baik); 90%
Rendah	Aplikasi	Portal "KUPANG	layanan publik
		DIGITAL" soft	terdigitalisasi.
		launching.	
Isu 3: Literasi Rendah	Literasi Digital 4 Pilar	500 Duta Digital	80% Masyarakat
& Ancaman Hoaks	& War Room Anti	terlatih; 200 konten	Literasi Baik;
	Hoaks	klarifikasi hoaks	Penurunan hoaks 78%
		dipublikasikan per	dari baseline 2025.
		tahun.	
Isu 4: Ekonomi Belum	Kupang Digital Hub &	5.000 UMKM terdaftar	Omzet UMKM digital
Digital	Digitalisasi UMKM	di platform e-commerce	Rp50 Miliar/Tahun;
		lokal/nasional; Digital	1.000 Lapangan kerja
		Hub operasional.	baru sektor TIK.
Dampak Akhir	Implementasi Terpadu	Peningkatan Indeks	Peningkatan <b>IPM 75</b> +
	Semua Program	SPBE & Indeks Literasi	dan Penurunan
		Digital	Kemiskinan 18% (Visi
			EMAS).

# C. Rencana Strategis Pencapaian Target Visi dan Misi (2025–2029)

# C.1. Roadmap Transformasi Digital (Fondasi SPBE)

#### C.1.1. Urgensi Arsitektur SPBE

Implementasi SPBE yang berhasil memerlukan Arsitektur SPBE (ASPBE) yang menjadi cetak biru teknis dan manajerial. Tanpa ASPBE, Diskominfo akan terjebak dalam pengembangan aplikasi yang terpisah (*silo system*) dan inefisiensi anggaran TIK. ASPBE harus mencakup **7 Domain** sesuai Perpres 132/2022.

- **Domain 1: Proses Bisnis:** Standarisasi alur kerja antar-OPD (*One Data, One Process*).
- **Domain 2: Layanan SPBE:** Penetapan layanan prioritas (*Quick Wins*) yang akan didigitalisasi.
- **Domain 3: Data dan Informasi:** Regulasi Satu Data, konsolidasi data, dan pembangunan *Data Lake*.
- **Domain 4: Aplikasi SPBE:** Konsolidasi aplikasi, penggunaan *General Application* (seperti *E-Office* terpusat), dan pengembangan *Middleware/API Gateway*.
- **Domain 5: Infrastruktur SPBE:** Pembangunan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* (DRC) yang terpusat.
- **Domain 6: Keamanan SPBE:** Penetapan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dan manajemen risiko siber.
- **Domain 7: Tata Kelola SPBE:** Pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan Peraturan Bupati (Perbup) pendukung.

#### C.1.2. Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE

Dokumen ASPBE dan Peta Rencana disusun dalam dua fase utama, ditargetkan selesai dalam 12–18 bulan pertama kepemimpinan.

Tabel 3 2 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Kupang

Fase	Periode	Kegiatan Utama	Output Kunci
Fase I: Persiapan dan	Bulan 1–6 (2025)	Pembentukan Tim	Dokumen Analisis
Assessment		Koordinasi (Perbup);	Kondisi Eksisting
		Baseline Assessment	(Current State); Peta
		Indeks SPBE;	Masalah TIK; Skor
		Inventarisasi 100% aset	Baseline SPBE.
		TIK dan aplikasi	
		eksisting (Audit Silo).	
Fase II: Desain dan	Bulan 7–18 (2026)	Perumusan Arsitektur 7	Dokumen Arsitektur
Regulasi		Domain; Penyusunan	SPBE disahkan;
		Peta Rencana SPBE	Perbup SPBE;
		2025–2029	Rencana Implementasi

		(Terintegrasi RPJMD);	Bertahap.
		Penyusunan Konsep	
		Perbup SPBE dan Satu	
		Data.	
Fase III: Implementasi	Tahun 2–5 (2027–	Implementasi Aplikasi	Peningkatan Indeks
& Konsolidasi	2029)	Prioritas (Quick Wins);	SPBE; Konsolidasi
		Pembangunan	Aplikasi (target 40+
		Infrastruktur (DRC);	aplikasi terintegrasi);
		Integrasi sistem	Tercapainya 90%
		menggunakan API	Layanan Digital.
		Gateway; Monitoring	
		berkala (SIA SPBE).	

#### C.1.3. Integrasi Aplikasi (Silo System Mitigation)

Strategi utama untuk mencapai Target 1 (90% Layanan Digital) adalah menghentikan *silo system* dan mengintegrasikan semua layanan di bawah satu payung: **Portal Kupang Digital**.

- 1. **Moratorium Aplikasi:** Menerapkan kebijakan ketat bahwa OPD dilarang membuat aplikasi baru kecuali terbukti unik dan sudah terintegrasi dengan ASPBE. Anggaran yang dialokasikan sebelumnya untuk aplikasi tumpang tindih dialihkan untuk penguatan *Data Center* dan *Security*.
- 2. *Middleware* dan *API Gateway*: Pembangunan *middleware* sebagai lapisan penghubung antara sistem *backend* OPD yang berbeda-beda. Implementasi *Application Programming Interface* (API) yang terstandar menjadi wajib bagi setiap aplikasi baru dan aplikasi eksisting yang dipertahankan.
- 3. **Portal "KUPANG DIGITAL"** (*Super-Apps*): Dikembangkan sebagai *Single Sign-On* (SSO) untuk seluruh layanan publik.
  - Fitur Kunci: SSO (1 Akun untuk semua), E-Payment Gateway (Integrasi QRIS/Bank BPD NTT), Dashboard Pelanggan (Status tracking permohonan), dan Chatbot Bantuan.
  - Aplikasi Prioritas Integrasi: E-Office (Internal), LAPOR KUPANG (Pengaduan),
     DUKCAPIL ONLINE, dan Perizinan OSS.
- 4. **Infrastruktur Terpusat:** Konsolidasi seluruh *server* OPD ke dalam satu *Data Center* milik Diskominfo untuk efisiensi lisensi, *security*, dan *maintenance*.

#### C.1.4. Percepatan Quick Wins Digitalisasi Layanan

Untuk membangun momentum dan kepercayaan publik, beberapa layanan harus didigitalisasi dalam 12 bulan pertama (*Quick Wins*):

• *E-Office* (Tanda Tangan Digital): Implementasi *E-Office* terpusat dan tanda tangan digital untuk surat internal, mengurangi penggunaan kertas, dan mempercepat disposisi hingga 70%.

- Layanan Surat Keterangan Desa/Kelurahan: Digitalisasi pembuatan Surat Keterangan (Domisili, Usaha, Tidak Mampu) yang dapat diajukan *fully online* oleh masyarakat.
- **Pengaduan Terpadu "LAPOR KUPANG":** Mengintegrasikan semua kanal pengaduan (*website, WhatsApp, media sosial*) ke dalam satu sistem yang terhubung dengan LAPOR! Nasional dan memiliki SOP respons cepat (maksimal 24 jam untuk kategori ringan).

#### C.2. Kolaborasi Multipihak dan Penguatan SDM

Keberhasilan Transformasi Digital mustahil dicapai tanpa dukungan ekosistem. Diskominfo akan memimpin kolaborasi berdasarkan model **Triple Helix** (Pemerintah-Akademisi-Industri) dan **Quadruple Helix** (menambahkan Komunitas/Masyarakat).

#### C.2.1. Rasional dan Model Triple Helix

• Rasional: Kabupaten Kupang memiliki keterbatasan anggaran TIK dan kekurangan *digital expert*. Kolaborasi memungkinkan *resource sharing* (infrastruktur provinsi, *expertise* swasta, riset kampus) untuk menutup *gap* ini.

#### • Kerangka Triple Helix:

- Pemerintah (Diskominfo): Regulator, koordinator, governance, dan penentu kebijakan.
- Akademisi (Perguruan Tinggi): Penyedia Digital Talent, riset terapan, inkubasi startup, dan kurikulum literasi digital.
- o **Industri (Swasta/Operator):** Penyedia modal (KPBU), teknologi (cloud, *security*), dan pelatihan CSR.

#### C.2.2. Sinergi dengan Pemerintah Pusat (Kemitraan BAKTI, KemenPANRB, Komdigi)

#### 1. Optimalisasi Infrastruktur BAKTI:

- Advokasi Peningkatan Bandwidth: Secara proaktif mengajukan proposal ke BAKTI Komdigi untuk peningkatan bandwidth dari 4 Mbps menjadi minimal 10 Mbps per titik akses, disertai dengan penambahan perangkat booster di 137 lokasi.
- Sharing Infrastruktur: Menjajaki penggunaan *fiber optic backbone* yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau BUMN (Telkom) untuk jaringan intra-pemerintah.

#### 2. SPBE dan Smart City KemenPANRB:

- Bimbingan Teknis: Mengikuti Bimbingan Teknis penyusunan ASPBE dan Peta Rencana, serta partisipasi aktif dalam Forum Koordinasi Transformasi Digital Pelayanan Publik.
- o **Integrasi Nasional:** Mempersiapkan integrasi layanan prioritas Kupang Digital dengan portal nasional (*INA Digital*) dan *Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital* KemenPANRB.

#### 3. Penguatan SDM Komdigi:

o **Digital Talent Scholarship:** Mengirimkan minimal **50 ASN dan 200 pemuda** per tahun untuk mengikuti pelatihan bersertifikat gratis dari Komdigi (bidang *Cyber Security, Big Data,* 

#### C.2.3. Sinergi dengan Sektor Swasta (Skema KPBU)

Karena keterbatasan APBD, skema **Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)** adalah solusi untuk proyek infrastruktur TIK berskala besar.

#### 1. Proyek Prioritas KPBU:

- Pembangunan Data Center dan DRC: KPBU untuk penyediaan Green Data Center terpusat (Desain-Bangun-Operasi/DBO) dengan standar tier-2, menggantikan server room OPD yang tidak standar.
- o **Perluasan** *Broadband* **Desa:** Kemitraan dengan operator telekomunikasi (Telkomsel/Indosat/XL) untuk memasang *Base Transceiver Station* (BTS) di lokasi *blank spot* dengan insentif kemudahan perizinan dari Pemda.
- 2. **Kemitraan CSR:** Mendekati perusahaan teknologi besar (Google, Microsoft) untuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berfokus pada:
  - **Hibah Lisensi** *Software*: Lisensi *E-Office* atau *Cloud Computing* untuk efisiensi anggaran pemerintah.
  - Donasi Perangkat: Donasi komputer/tablet untuk 24 Pusat Literasi Digital di kecamatan.

#### C.2.4. Penguatan Knowledge Management dan Digital Talent

#### 1. Knowledge Management System (KMS):

- Platform: Membangun web-based repository internal yang menyimpan seluruh SOP, dokumentasi teknis, source code aplikasi, dan lesson learned dari proyek TIK.
- Community of Practice (CoP): Pembentukan CoP Digital yang terdiri dari seluruh pengelola TIK (min. 2 orang per OPD) yang bertemu rutin bulanan untuk berbagi pengetahuan dan troubleshooting bersama.

#### 2. Program Penguatan SDM Berjenjang:

- Tingkat Dasar: Pelatihan SPBE awareness dan Digital Ethics wajib bagi 100% ASN (target 2026).
- Tingkat Menengah: Pelatihan manajemen data dan system administration bagi pengelola
   TIK OPD (target 50% tersertifikasi 2028).
- Tingkat Lanjut: Sertifikasi Cloud Computing, Cyber Security, dan Big Data Analytics bagi
   Tim Inti Diskominfo (target 100% tersertifikasi 2029).
- 3. Sinergi Akademisi: MoU dengan Universitas Nusa Cendana dan STIKOM Uyelindo untuk:
  - Program Magang: Mahasiswa IT/SI magang 6 bulan di Diskominfo/OPD sebagai Digital
     Assistant.
  - Riset Terapan: Kolaborasi riset untuk Smart Waste Management atau Smart Farming lokal.

## C.3. Pengembangan Layanan Inovatif (Smart Region)

#### C.3.1. Konsep Smart Region Kabupaten Kupang

Konsep *Smart Region* di Kabupaten Kupang berfokus pada **inklusivitas** dan **pemerataan akses** ke wilayah pedesaan/kepulauan. Visi *Smart Region* adalah: "Mewujudkan Kabupaten Kupang yang Cerdas, Berkelanjutan, dan Inklusif melalui Pemanfaatan Teknologi untuk Kesejahteraan Masyarakat menuju Kabupaten Kupang EMAS."

#### C.3.2. Pengembangan Portal Super-Apps "KUPANG DIGITAL"

Aplikasi ini adalah manifestasi dari Target 1 (Digitalisasi Layanan Publik) dan menjadi *front-end* dari Arsitektur SPBE.

- 1. **Prinsip Desain:** *Mobile-First Approach* (karena penetrasi *smartphone* tinggi), *User-Centric Design* (UI/UX disesuaikan dengan mayoritas masyarakat), dan *Accessibility* (mendukung pengguna disabilitas).
- 2. **Fitur Inti:** Single Sign-On, E-Payment Gateway, Personalized Dashboard, Layanan Perizinan (E-KUPANG), dan Pengaduan (LAPOR KUPANG).
- 3. **Metode Pengembangan:** *Agile Development* dengan fase *pilot testing* di 3 kecamatan sebelum *grand launching* untuk memastikan *usability* yang tinggi.

#### C.3.3. Program Prioritas 5 Dimensi Smart Region

Tabel 3 3 Program Prioritas 5 Dimensi Smart Region

Dimensi	Program Kunci	Deskripsi dan Inovasi	Outcome Kunci (2029)
1. Smart Governance	<b>Command Center</b>	Pusat monitoring	Waktu Respons
	24/7	terpadu, integrasi 150+	Pemerintah terhadap
		CCTV/Sensor IoT, dan	Insiden < 15 menit.
		Dashboard Kinerja	Indeks SPBE <b>3.5</b> +.
		SPBE real-time untuk	
		decision making.	
2. Smart Economy	Digitalisasi 5.000	Platform Marketplace	Omzet UMKM Digital
	UMKM	Lokal KupangMart,	Rp50 Miliar/Tahun.
		Pelatihan <i>Digital</i>	Investasi meningkat
		Marketing (bersama	50%.
		Google/Meta), Akses	
		Fintech (QRIS) bagi	
		pelaku UMKM.	
3. Smart Living	Telemedicine Kupang	Layanan konsultasi	Akses Layanan

	& Rekam Medis	kesehatan jarak jauh	Kesehatan di wilayah
	Elektronik	(Telemedicine) di 10	terpencil meningkat
		Puskesmas wilayah	200%.
		terpencil. Integrasi	
		Rekam Medis dengan	
		Satusehat Nasional.	
4. Smart Environment	Smart Waste	Uji coba sensor IoT	Efisiensi Pengelolaan
	Management IoT	pada tempat sampah	Sampah 30% dan
		komunal di 3 lokasi	Kualitas Lingkungan
		prioritas untuk optimasi	kategori Baik.
		rute pengangkutan	
		sampah.	
		Crowdsourcing laporan	
		sampah.	
5. Smart Mobility	Smart Public	GPS tracking armada	Peningkatan
	Transport Information	angkutan umum utama	Penggunaan
		(Angkot), informasi	Transportasi Publik
		rute dan jadwal real-	60% dan kemacetan
		time melalui aplikasi	berkurang 25%.
		Kupang Digital.	

#### C.3.4. Optimalisasi Media Sosial dan Crisis Communication

Optimalisasi media sosial bertujuan memulihkan kepercayaan publik dan memastikan komunikasi dua arah.

#### 1. Strategi Konten (Pilar Komunikasi):

- o Informatif & Transparan (40%): Publikasi data, kebijakan, dan *progress* SPBE.
- o Edukasi (25%): Konten 4 Pilar Literasi Digital dan tutorial layanan digital.
- Engagement (20%): Q&A Sesi dengan Pejabat, Polling kebijakan, User-Generated Content.

#### 2. Crisis Communication (War Room Anti Hoaks):

- SOP Rapid Response: Memastikan waktu respon (verifikasi dan klarifikasi) terhadap hoaks sensitif maksimal 2 jam setelah terdeteksi.
- **Tim:** Tim Terpadu yang melibatkan *Content Creator*, *Community Manager*, dan Tim Hukum.
- 3. Target Engagement: Peningkatan *Engagement Rate* dari 2% (2025) menjadi 8%+ (2029) dan *Average Response Time* dari 6 jam menjadi 30 menit.

#### C.4. Monitoring, Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Sistem pengukuran output/outcome (target: 90% layanan publik bisa diakses digital 2028, penurunan hoaks 40% per tahun, peningkatan literasi digital 80% masyarakat 2029).

#### C.4.1. Pentingnya Sistem Pengukuran Yang Terukur

Transformasi digital tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang kuat akan berjalan tanpa arah dan sulit dipertanggungjawabkan. Sistem pengukuran output/outcome yang terstruktur dan berbasis data sangat penting untuk :

- 1. Mengukur Kemajuan: Memastikan program berjalan sesuai target dan timeline
- 2. Akuntabilitas: Pertanggungjawaban kinerja kepada publik dan stakeholder
- 3. Perbaikan Berkelanjutan: Identifikasi masalah dan area perbaikan secara cepat
- 4. Pengambilan Keputusan: Data-driven decision making untuk efektivitas program
- 5. Transparansi: Informasi publik tentang capaian transformasi digital daerah

#### C.4.2. Kerangka Pengukuran Kinerja

#### C.4.2.1. Hierarki Indikator Kinerja

Input  $\rightarrow$  Activities  $\rightarrow$  Output  $\rightarrow$  Outcome  $\rightarrow$  Impact

- Input: Sumber daya (anggaran, SDM, infrastruktur)
- Activities: Kegiatan dan program yang dilaksanakan
- Output: Hasil langsung dari kegiatan (aplikasi, pelatihan, infrastruktur)
- Outcome: Perubahan perilaku/kondisi yang diharapkan (pengguna, kepuasan, literasi)
- Impact: Dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah (kesejahteraan, ekonomi, IPM)

### C.4.2.2. Prinsip Indikator yang Baik (SMART)

- Specific: Spesifik dan jelas apa yang diukur
- Measurable: Terukur secara kuantitatif atau kualitatif
- Achievable: Realistis dan dapat dicapai
- Relevant: Relevan dengan tujuan strategis
- Time-bound: Memiliki batas waktu pencapaian yang jelas

#### C.4.3. Target 1: 90% Layanan Publik Dapat Diakses Digital Pada 2028

#### C.4.3.1. Definisi dan Parameter

#### Definisi Layanan Publik Digital:

Layanan pemerintah yang dapat diakses dan diproses secara online/elektronik tanpa harus datang ke kantor, atau minimal dengan kunjungan fisik yang sangat minimal.

## Kategori Layanan Publik:

- Kategori A (Prioritas Tinggi): Perizinan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, pengaduan
- Kategori B (Prioritas Menengah): Pajak dan retribusi, layanan sosial, ketenagakerjaan
- Kategori C (Prioritas Rendah): Layanan penunjang lainnya

#### Baseline 2025:

- Total layanan publik Kabupaten Kupang: 150 jenis layanan (di 24 OPD)
- Layanan yang sudah digital: 15 jenis (10%)
- Target 2028: 135 jenis layanan digital (90%)

#### C.4.3.2. Roadmap Digitalisasi Layanan

Tabel 3 4 Roadmap Digitalisasi Layanan

Tahun	Target Kumulatif Layanan Digital	Persentase	Fokus Layanan
2025	30 layanan	20%	Perizinan prioritas, kependudukan dasar, pengaduan
2026	60 layanan	40%	Kesehatan, pendidikan, pajak daerah
2027	105 layanan	70%	Layanan sosial, transportasi, lingkungan
2028	135 layanan	90%	Seluruh layanan kategori A & B, sebagian kategori C
2029	145 layanan	97%	Optimalisasi dan ekspansi

#### C.4.3.3. Indikator Pengukuran

## A. Indikator Output:

Tabel 3 5 Indikator Output

<i>Indikator</i> 2025 2026 202	27 2028 Metode Pengukuran
--------------------------------	---------------------------

Jumlah	layanan	30	60	105	135	Inventarisasi dan
terdigitalisasi						verifikasi OPD
Persentase	layanan	20%	40%	70%	90%	(Layanan digital/Total
digital						layanan) x 100%
OPD dengan	layanan	12	18	22	24	Audit internal Dinas
digital		OPD	OPD	OPD	OPD	Kominfo
					(100%)	
Aplikasi layanan	aktif	5 apps	10	15	20+	Dashboard monitoring
			apps	apps	apps	aplikasi

#### B. Indikator Outcome:

Tabel 3 6 Indikator Outcome

Indikator	2025	2026	2027	2028	Metode Pengukuran
Jumlah pengguna	25.000	75.000	150.000	250.000+	Data registrasi
layanan digital					aplikasi dan transaksi
Transaksi layanan	10.000	40.000	80.000	150.000+	Log transaksi sistem
digital/bulan					
Pengurangan waktu	-20%	-35%	-50%	-60%	Time-motion study &
proses layanan					user survey
Kepuasan pengguna	70%	78%	83%	88%+	Survei kepuasan
layanan digital					berkala (CSAT)
Pengurangan	-15%	-30%	-50%	-70%	Data buku tamu &
kunjungan fisik ke					sistem antrian
kantor					

## C. Indikator Impact:

- Efisiensi anggaran operasional OPD: 30% pada 2028
- Pengurangan komplain layanan publik: 60% pada 2028
- Peningkatan skor Reformasi Birokrasi: dari 70 menjadi 85+ pada 2028
- Kontribusi terhadap Ease of Doing Business (EoDB) Kabupaten Kupang

#### C.4.3.4. Metode Pengukuran dan Monitoring

## A. Inventarisasi Layanan Publik (Baseline)

• Pemetaan seluruh jenis layanan di 24 OPD Kabupaten Kupang

- Klasifikasi layanan berdasarkan kategori dan prioritas
- Assessment tingkat kesiapan digitalisasi (feasibility study)

#### B. Monitoring Progress Digitalisasi

- Dashboard Real-Time: Visualisasi progress digitalisasi layanan per OPD
- Quarterly Review: Rapat evaluasi triwulanan dengan seluruh OPD
- Sistem Pelaporan: Setiap OPD melaporkan progress digitalisasi layanan bulanan
- Audit Internal: Tim audit Dinas Kominfo melakukan verifikasi berkala

#### C. Pengukuran Kualitas Layanan Digital

- Uptime Monitoring: Target minimal 99.5% availability
- Response Time: Loading aplikasi maksimal 3 detik
- Error Rate: Maksimal 0.5% transaksi gagal
- User Experience Testing: Regular usability testing dengan pengguna

## D. Survei Kepuasan Pengguna

- Metode: Online survey, in-app feedback, focus group discussion
- Frekuensi: Triwulanan untuk setiap layanan prioritas
- Sample: Minimal 400 responden per layanan (MoE  $\pm$ 5%, CI 95%)
- Instrumen: Customer Satisfaction Score (CSAT), Net Promoter Score (NPS), Customer Effort Score (CES)

#### C.4.3.5. Strategi Akselerasi Pencapaian Target

#### A. Quick Wins (2025-2026)

- Fokus pada layanan dengan volume tinggi dan proses sederhana
- Digitalisasi 10 layanan prioritas dalam 12 bulan pertama
- Sosialisasi massif untuk membangun awareness dan trust

#### B. Scaling Up (2027-2028)

- Replikasi model sukses ke layanan lain
- Integrasi aplikasi untuk pengalaman pengguna yang seamless
- Kolaborasi dengan swasta untuk percepatan pengembangan

#### C. Insentif dan Disinsentif

- Insentif: Penghargaan bagi OPD dengan digitalisasi terbaik
- Disinsentif: Evaluasi kinerja OPD yang tertinggal
- Dukungan: Asistensi teknis dan pendampingan untuk OPD yang kesulitan

#### C.4.3. Target 2: Penurunan Hoaks 40% Per Tahun

#### C.4.3.1. Definisi dan Parameter

#### Definisi Hoaks:

Informasi yang sesungguhnya tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar adanya dengan tujuan menipu, mengelabui, atau menyesatkan pembaca/pendengar.

#### Kategori Hoaks:

- Hoaks Politik: Terkait kebijakan, pejabat, pemilu
- Hoaks Kesehatan: Terkait penyakit, obat, vaksin
- Hoaks Sosial: Isu SARA, konflik horizontal
- Hoaks Ekonomi: Penipuan, investasi bodong
- Hoaks Bencana: Isu bencana palsu, kepanikan

#### Baseline 2025:

- Laporan hoaks per bulan di Kabupaten Kupang: 50 kasus (asumsi)
- Tingkat penyebaran hoaks yang dibiarkan: 70% (35 kasus per bulan tersebar luas)
- Target penurunan: 40% per tahun (dari baseline)

#### C.4.3.2. Roadmap Penurunan Hoaks

Tabel 3 7 Roadmap Penurunan Hoaks

Tahun	Target Laporan	Penurunan	Fokus Program
	Hoaks/Bulan	Kumulatif	
2025	50 kasus (baseline)	0%	Pembentukan sistem monitoring
			& tim rapid response
2026	30 kasus	-40%	Literasi digital massif, war room
			anti hoaks
<i>2027</i>	18 kasus	-64% (40% dari 30)	Kolaborasi platform digital, AI
			detection
2028	11 kasus	-78% (40% dari 18)	Ekosistem digital yang kritis dan
			bertanggung jawab
2029	7 kasus	-86% (40% dari 11)	Sustainabilitas dan optimalisasi

Catatan: Penurunan 40% per tahun dihitung dari jumlah tahun sebelumnya, bukan dari baseline.

# C.4.3.3. Indikator Pengukuran

# A. Indikator Output:

Tabel 3 8 Indikator Output

Indikator	2025	2026	2027	2028	Metode
					Pengukuran
Tim Rapid Response	1 tim	1 tim +	Full	Optimized	Struktur
Hoaks terbentuk		jaringan	network		organisasi
Jumlah konten	50	200	400	600+	Repository
edukasi anti-hoaks	konten	konten	konten	konten	konten
Platform monitoring	Belum	1	Optimized	AI-	Sistem
hoaks aktif		platform		powered	teknologi
Kolaborasi dengan	0 MoU	3 MoU	5 MoU	8+ MoU	Dokumen
platform digital					kerjasama
Pelatihan literasi	50 sesi	150 sesi	250 sesi	400+ sesi	Laporan
digital dilaksanakan					kegiatan

# B. Indikator Outcome:

Tabel 3 9 Indikator Outcome

Indikator	2025	2026	2027	2028	Metode
					Pengukuran
Laporan hoaks	50 kasus	30 kasus	18 kasus	11 kasus	Dashboard
terdeteksi/bulan					monitoring
					hoaks
Waktu respon	24 jam	6 jam	2 jam	< 1 jam	Log sistem rapid
terhadap hoaks					response
Tingkat viralitas	1000 share	600	350 share	200	Social media
hoaks (avg share)		share		share	analytics
Masyarakat yang	30%	50%	65%	80%+	Survei perilaku
verify sebelum share					digital
Partisipasi	100	200	350	500+	Sistem
masyarakat	laporan/bu				pelaporan hoaks
melaporkan hoaks	lan				

#### C. Indikator Impact:

- Penurunan konflik sosial akibat hoaks: 60% pada 2028
- Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah: 85%+ pada 2028
- Penurunan tindak pidana penyebaran informasi palsu: 50% pada 2028

## C.4.3.4. Metode Pengukuran dan Monitoring

#### A. Sistem Monitoring Hoaks

- 1. Platform Monitoring Terintegrasi:
  - Social Media Monitoring Tools: Hootsuite, Brandwatch, CrowdTangle untuk monitoring platform (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp grup)
  - Keyword Alert System: Sistem notifikasi otomatis jika ada keyword sensitif yang viral
  - AI-Powered Detection: Machine learning untuk deteksi potensi hoaks berdasarkan pattern konten
  - Dashboard Real-Time: Visualisasi hoaks yang terdeteksi, tingkat viralitas, dan respons yang dilakukan

#### 2. Sumber Data Monitoring:

- Media sosial (Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok)
- Grup WhatsApp dan Telegram (melalui partisipasi anggota tim)
- Portal berita online lokal dan nasional
- Laporan masyarakat melalui aplikasi Lapor Hoaks Kupang
- Kolaborasi dengan Polri Cyber Crime dan Kementerian Kominfo

#### B. Klasifikasi dan Dokumentasi Hoaks

#### Metode Klasifikasi:

- Tingkat Bahaya: Rendah, Sedang, Tinggi, Kritis
- Kategori: Politik, Kesehatan, Sosial, Ekonomi, Bencana
- Viralitas: Jumlah share, reach, engagement
- Sumber: Platform asal, akun penyebar pertama (jika teridentifikasi)

#### Database Hoaks:

- Repository seluruh hoaks yang terdeteksi dengan dokumentasi lengkap
- Analisis tren hoaks bulanan, tahunan, dan per kategori
- Pola penyebaran dan modus operandi hoaks di Kabupaten Kupang

#### C. Survei Perilaku Digital Masyarakat

#### Metode Survei:

- Populasi: Warga Kabupaten Kupang usia 13-70 tahun yang mengakses internet
- Sampel: 1.000 responden (MoE  $\pm 3.1\%$ , CI 95%)
- Metode: Face-to-face interview dengan multistage random sampling
- Frekuensi: Annual survey (setiap September)

#### Pertanyaan Kunci:

- 1. Apakah Anda pernah menerima informasi yang ternyata hoaks dalam 3 bulan terakhir?
- 2. Apakah Anda memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya?
- 3. Dari mana Anda memverifikasi informasi yang Anda terima?
- 4. Apakah Anda pernah melaporkan hoaks yang Anda temukan?
- 5. Seberapa percaya Anda terhadap informasi dari akun resmi pemerintah?

## D. Pengukuran Efektivitas Respons

#### **Key Metrics:**

- Detection Time: Waktu dari hoaks pertama muncul hingga terdeteksi sistem
- Response Time: Waktu dari deteksi hingga konten klarifikasi dipublikasikan
- Reach Ratio: Perbandingan reach konten hoaks vs konten klarifikasi
- Correction Effectiveness: Penurunan viralitas hoaks setelah klarifikasi dipublikasikan

## 5. Strategi Penurunan Hoaks

#### A. Pencegahan (Preventive)

- 1. Literasi Digital Massif
  - Program "Saring Sebelum Sharing" di 24 kecamatan
  - Pelatihan literasi digital untuk 50.000+ masyarakat (2025-2028)
  - Edukasi di sekolah, kampus, kelompok masyarakat, dan tempat ibadah
  - Konten edukatif viral-friendly di media sosial (infografis, video pendek, meme edukatif)
- 2. Kampanye "3 Langkah Cegah Hoaks"
  - Langkah 1: Jangan langsung menyebarkan informasi yang diterima
  - Langkah 2: Periksa kebenaran informasi dari sumber resmi
  - Langkah 3: Pertimbangkan manfaat sebelum membagikan

#### 3. Konten Positif dan Faktual

- Produksi 50+ konten faktual per bulan di media sosial resmi pemerintah
- Storytelling positif tentang Kabupaten Kupang untuk counter-narrative
- Kolaborasi dengan influencer lokal untuk amplifikasi konten edukatif

#### B. Deteksi Dini (Early Detection)

#### 1. War Room Anti Hoaks

- Tim monitoring 24/7 untuk deteksi dini hoaks di media sosial
- Sistem alert otomatis untuk hoaks yang berpotensi viral
- Koordinasi dengan Polri, TNI, dan instansi terkait

#### 2. Partisipasi Masyarakat

- Aplikasi/WhatsApp "Lapor Hoaks Kupang" untuk melaporkan dugaan hoaks
- Reward bagi masyarakat yang aktif melaporkan hoaks (gamifikasi)
- Pembentukan Relawan Digital Anti Hoaks di 24 kecamatan

#### C. Rapid Response (Quick Response)

### 1. Standard Operating Procedure (SOP) Rapid Response:

- 0-1 jam: Deteksi dan verifikasi hoaks
- 1-2 jam: Koordinasi dengan OPD terkait dan pihak berwenang
- 2-4 jam: Produksi konten klarifikasi (infografis, video, press release)
- 4-6 jam: Publikasi klarifikasi di semua platform resmi
- 6-24 jam: Amplifikasi klarifikasi melalui influencer dan media massa

# 2. Format Klarifikasi yang Efektif:

- Bahasa sederhana dan mudah dipahami
- Visual menarik (infografis, komparasi gambar asli vs hoaks)
- Sumber rujukan yang jelas dan kredibel
- Ajakan untuk tidak menyebarkan hoaks

#### D. Kolaborasi Multi-Pihak

- 1. Kerjasama dengan Platform Digital:
  - MoU dengan Facebook/Meta, Twitter/X, TikTok, Google untuk takedown konten hoaks
  - Pelaporan akun penyebar hoaks untuk penindakan platform
  - Kolaborasi dalam program literasi digital

#### 2. Kerjasama dengan Media Massa:

- Program cek fakta bersama media lokal
- Rubrik "Hoaks atau Fakta" di media cetak dan online
- Talkshow radio dan TV tentang literasi digital

#### 3. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum:

- Koordinasi dengan Polri Cyber Crime untuk penindakan hukum penyebar hoaks
- Sosialisasi sanksi hukum penyebaran informasi palsu (UU ITE)

#### E. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

- Review bulanan efektivitas program anti-hoaks
- Analisis tren dan pola baru penyebaran hoaks
- Adjustment strategi berdasarkan data dan evaluasi
- Sharing best practice dengan daerah lain

#### C.4.4. Target 3: Peningkatan Literasi Digital 80% Masyarakat Pada 2029

#### C.4.4.1. Definisi dan Parameter

#### Definisi Literasi Digital:

Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari.

- 4 Pilar Literasi Digital (Roadmap Literasi Digital Indonesia 2020-2024):
  - 1. Digital Skills: Kemampuan menggunakan perangkat digital, internet, aplikasi
  - 2. Digital Ethics: Pemahaman etika digital, hak cipta, privasi
  - 3. Digital Safety: Kesadaran keamanan siber, perlindungan data pribadi
  - 4. Digital Culture: Kemampuan membaca, menganalisis, dan memproduksi konten digital

# Skala Pengukuran:

Indeks Literasi Digital menggunakan skala 1-5 (Skala Likert):

- 1.00-2.00: Literasi digital rendah
- 2.01-3.00: Literasi digital sedang
- 3.01-4.00: Literasi digital baik
- 4.01-5.00: Literasi digital sangat baik

#### Baseline 2025:

- Indeks Literasi Digital Kabupaten Kupang: 2.5 (kategori sedang) asumsi
- Persentase masyarakat dengan literasi digital baik (skor >3.0): 30%
- Target 2029: 80% masyarakat dengan literasi digital baik (skor >3.0)

#### C.4.4.2. Roadmap Peningkatan Literasi Digital

Tabel 3 10 Roadmap Peningkatan Literasi Digital

Tahun	Indeks	% Masyarakat	Fokus Program
	Literasi	Literasi Baik (>3.0)	
	Digital		
2025	2.5 (baseline)	30%	Baseline survey, program pilot 5

			kecamatan
2026	2.8	45%	Ekspansi ke 15 kecamatan, pelatihan masif
2027	3.2	60%	Cakupan 24 kecamatan, fokus kelompok rentan
2028	3.5	72%	Deepening program, optimalisasi
2029	3.8	80%+	Sustainabilitas dan continuous improvement

# C.4.4.3. Indikator Pengukuran

# A. Indikator Output:

Tabel 3 11 Indikator Output

Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	Metode
Pelatihan literasi	100 sesi	250 sesi	450 sesi	600 sesi	800+	Laporan
digital dilaksanakan					sesi	kegiatan
Peserta pelatihan	5.000	15.000	30.000	45.000	60.000+	Database
literasi digital						peserta
Kecamatan tercover	5	15	24	24	24	Mapping
program					(100%)	program
Duta Digital terlatih	50	150	300	400	500+	Sertifikat
Konten edukasi literasi	200	500	800	1.100	1.500+	Repository
digital						konten
Pusat Literasi Digital	1	5	12	18	24	Infrastruktur
terbentuk						

# B. Indikator Outcome (Per Pilar):

# 1. Digital Skills:

Tabel 3 12 Digital Skills

Indikator	2025	2027	2029	Target 2029	Metode
% татри	60%	75%	85%	85%+	Survei
menggunakan					
smartphone					
% mampu browsing &	55%	70%	82%	80%+	Survei

search internet					
% татри	40%	60%	75%	75%+	Survei
download/upload file					
% татри	25%	50%	70%	70%+	Survei
menggunakan e-					
commerce					
Skor rata-rata Digital	2.4	3.3	4.0	4.0+	Survei
Skills					

# 2. Digital Ethics:

Tabel 3 13 Digital Ethics

Indikator	2025	2027	2029	Target	Metode
				2029	
% memahami hak cipta digital	35%	60%	78%	75%+	Survei
% memahami etika bermedia sosial	40%	65%	80%	80%+	Survei
% respect terhadap privasi orang lain	50%	70%	85%	85%+	Survei
% tidak menyebarkan konten negatif	45%	68%	82%	80%+	Survei
Skor rata-rata Digital Ethics	2.5	3.4	4.1	4.0+	Survei

# 3. Digital Safety:

Tabel 3 14 Digital Safety

Indikator	2025	2027	2029	Target	Metode
				2029	
% menggunakan password kuat	30%	55%	75%	75%+	Survei
% aware terhadap phishing/scam	25%	50%	72%	70%+	Survei
% melindungi data pribadi	35%	60%	78%	75%+	Survei
% verify informasi sebelum share	30%	65%	80%	80%+	Survei
Skor rata-rata Digital Safety	2.3	3.2	3.9	3.8+	Survei

# 4. Digital Culture:

Tabel 3 15 Digital Culture

Indikator	2025	2027	2029	Target	Metode
				2029	

% aktif memproduksi konten positif	20%	40%	65%	60%+	Survei & analytics
% memanfaatkan digital untuk produktivitas	30%	55%	75%	75%+	Survei
% berpartisipasi dalam platform digital	25%	50%	70%	70%+	Survei
% memanfaatkan digital untuk pembelajaran	35%	60%	80%	80%+	Survei
Skor rata-rata Digital Culture	2.4	3.1	3.8	3.8+	Survei

#### C. Indikator Impact:

- Peningkatan produktivitas ekonomi berbasis digital: 60% pada 2029
- Partisipasi masyarakat dalam program pemerintah digital: 75%+ pada 2029
- Penurunan digital divide (kesenjangan digital): 70% pada 2029
- Kontribusi terhadap peningkatan IPM Kabupaten Kupang

#### C.4.4.4. Metode Pengukuran Literasi Digital

#### A. Survei Literasi Digital Kabupaten Kupang

#### Desain Survei:

- Populasi: Warga Kabupaten Kupang usia 13-70 tahun yang mengakses internet
- Sampel: 1.200 responden (MoE ±2.8%, CI 95%)
- Metode: Face-to-face interview (home visit) dengan multistage random sampling
- Wilayah: Representatif 24 kecamatan dengan proporsi urban-rural
- Frekuensi: Annual survey (setiap Agustus-September)

#### Instrumen Survei:

- Total Pertanyaan: 30-35 pertanyaan (7-9 pertanyaan per pilar)
- Skala Jawaban: Likert Scale 1-5
- Pre-test: Pilot testing 100 responden untuk validitas dan reliabilitas
- Enumerator: Tim surveyor terlatih dengan latar belakang sosial/komunikasi

#### Contoh Pertanyaan per Pilar:

#### Digital Skills:

- 1. Seberapa sering Anda menggunakan smartphone/komputer? (1=tidak pernah, 5=setiap hari)
- 2. Seberapa mudah Anda mencari informasi di internet? (1=sangat sulit, 5=sangat mudah)

3. Seberapa mampu Anda mengunduh dan mengunggah file?

## Digital Ethics:

- 4. Seberapa paham Anda tentang hak cipta konten digital? (1=tidak paham, 5=sangat paham)
- 5. Seberapa sering Anda memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan?

#### Digital Safety:

- 6. Seberapa sering Anda mengganti password akun digital? (1=tidak pernah, 5=rutin)
- 7. Seberapa hati-hati Anda melindungi data pribadi di internet?

#### Digital Culture:

- 8. Seberapa sering Anda menggunakan internet untuk pembelajaran/produktivitas?
- 9. Seberapa aktif Anda berpartisipasi dalam platform digital (e-gov, e-commerce)?
- B. Perhitungan Indeks

## Langkah Perhitungan:

- 1. Skor Indikator: Rata-rata jawaban responden untuk setiap indikator (skala 1-5)
- 2. Skor Pilar: Rata-rata skor semua indikator dalam satu pilar
- 3. Indeks Literasi Digital: Rata-rata skor keempat pilar

#### Rumus:

Indeks Literasi Digital=Skor Digital Skills + Skor Digital Ethics + Skor Digital Safety + Skor Digital Culture4Indeks Literasi Digital=4Skor Digital Skills + Skor Digital Ethics + Skor Digital Safety + Skor Digital Culture

#### Interpretasi:

- Semakin tinggi indeks (mendekati 5), semakin baik literasi digital
- Benchmarking dengan indeks nasional (2022: 3.54)
- Target Kabupaten Kupang 2029: 3.8 (di atas rata-rata nasional)

#### C. Metode Pengukuran Komplementer

- 1. Pre-Post Test Pelatihan:
  - Test kemampuan digital sebelum dan sesudah pelatihan
  - Pengukuran efektivitas program pelatihan
  - Tracking progress peserta pelatihan (follow-up 3 bulan)
- 2. Analytics Platform Digital:
  - Jumlah pengguna aktif aplikasi pemerintah (DAU, MAU)
  - Engagement rate media sosial pemerintah
  - Transaksi layanan digital per kapita
- 3. Observasi Langsung:
  - Field observation penggunaan digital di masyarakat

- Focus Group Discussion (FGD) untuk deep insight
- Case study success story literasi digital

## C.4.4.5. Strategi Peningkatan Literasi Digital

## A. Program Pelatihan Masif

- 1. Pelatihan Berbasis Komunitas:
  - Kelas literasi digital di 24 kecamatan (2 sesi/bulan x 12 bulan = 24 sesi per kecamatan/tahun)
  - Pelatihan di kelurahan/desa, RT/RW, sekolah, kampus, tempat ibadah
  - Program "Digital Corner" di pasar, terminal, dan ruang publik

## 2. Segmentasi Target Pelatihan:

- Segmen Usia: Remaja (13-20), Dewasa (21-50), Lansia (51-70)
- Segmen Pendidikan: SD/sederajat, SMP/sederajat, SMA/sederajat, Perguruan Tinggi
- Segmen Pekerjaan: ASN, Guru, Petani, Pedagang, Nelayan, UMKM, Ibu Rumah Tangga
- Segmen Khusus: Penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok marginal
- 3. Kurikulum Pelatihan Berjenjang:
  - Level 1 (Basic): Penggunaan smartphone, browsing internet, media sosial dasar (4 jam)
  - Level 2 (Intermediate): E-commerce, digital payment, aplikasi pemerintah (6 jam)
  - Level 3 (Advanced): Konten kreator, digital marketing, keamanan siber (8 jam)

#### B. Pembentukan Duta Digital

- 1. Rekrutmen dan Pelatihan:
  - Rekrutmen 500 Duta Digital dari mahasiswa, pemuda, guru, tokoh masyarakat
  - Pelatihan intensif literasi digital + teaching skills (Training of Trainers)
  - Sertifikasi Duta Digital oleh Dinas Kominfo
- 2. Tugas dan Tanggung Jawab:
  - Mengajar kelas literasi digital di wilayah masing-masing
  - Pendampingan penggunaan aplikasi pemerintah
  - Helpdesk informal untuk masyarakat yang kesulitan menggunakan digital
  - Target: 1 Duta Digital melayani 100-200 masyarakat

#### 3. Insentif dan Reward:

- Honorarium per kegiatan pelatihan
- Sertifikat dan penghargaan dari Bupati

- Kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan gratis
- Prioritas rekrutmen CPNS/PPPK di bidang TIK

## C. Pusat Literasi Digital

#### 1. Infrastruktur:

- Pembangunan 24 Pusat Literasi Digital di setiap kecamatan
- Fasilitas: Komputer/laptop, internet, ruang kelas, perpustakaan digital
- Pemanfaatan ruang publik: balai desa/kelurahan, perpustakaan, community center

## 2. Program Regular:

- Kelas literasi digital rutin (3x seminggu)
- Free wifi dan akses komputer untuk masyarakat
- Layanan konsultasi digital (troubleshooting, cybersecurity advice)
- Event bulanan: workshop, lomba, demo aplikasi terbaru

#### D. Konten Edukasi Digital

#### 1. Format Konten Variatif:

- Video Tutorial: YouTube Dinas Kominfo Kupang (500+ video tutorial)
- Infografis: Tips dan trik digital, panduan aplikasi, awareness keamanan siber
- E-Book/Modul: Panduan literasi digital bahasa sederhana (downloadable)
- Podcast: "Ngobrol Digital" membahas tren dan tips digital
- Games Edukatif: Gamifikasi pembelajaran literasi digital

#### 2. Distribusi Konten:

- Media sosial resmi pemerintah (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube)
- Aplikasi Portal Kupang Digital
- WhatsApp Broadcast dan grup RT/RW
- TV lokal dan radio komunitas
- Billboard digital dan layar publik

## E. Kolaborasi Multipihak

#### 1. Perguruan Tinggi:

- Mahasiswa sebagai relawan literasi digital (pengabdian masyarakat)
- Dosen sebagai narasumber expert
- Program magang mahasiswa di Dinas Kominfo

## 2. Swasta dan CSR:

- Donasi perangkat (laptop, tablet) untuk pusat literasi digital
- Pelatihan digital marketing untuk UMKM
- Program "1 Pegawai 1 Kampung" untuk mentoring literasi digital

#### 3. Komunitas Digital:

- Kolaborasi dengan komunitas blogger, youtuber, developer lokal
- Kompetisi konten digital positif tentang Kabupaten Kupang
- Hackathon dan coding bootcamp untuk pemuda

## F. Monitoring Progress Individual

- Kartu Literasi Digital (Digital Passport) untuk tracking progress belajar
- E-Certificate untuk setiap level yang diselesaikan
- Leaderboard dan gamifikasi untuk mendorong partisipasi
- Badge digital untuk achievement (Bronze, Silver, Gold, Platinum)

#### C.4.5. Sistem Monitoring Dan Evaluasi Terintegrasi

#### C.4.5.1. Dashboard Monitoring Kinerja

Platform: Portal Dashboard Transformasi Digital Kabupaten Kupang (web-based)

#### Fitur Dashboard:

- Real-Time Metrics: Visualisasi data kinerja real-time untuk ketiga target
- Trendline Analysis: Grafik tren progress vs target per bulan/tahun
- Heatmap: Peta sebaran capaian per kecamatan/OPD
- Alert System: Notifikasi jika ada indikator di bawah target
- Benchmarking: Perbandingan dengan daerah lain dan target nasional

#### User Access:

- Level 1 (Publik): Dashboard umum dengan indikator agregat
- Level 2 (OPD): Dashboard per OPD dengan detail indikator masing-masing
- Level 3 (Pimpinan): Dashboard lengkap dengan analytics mendalam dan drill-down data

#### C.4.5.2. Sistem Pelaporan Berkala

#### Hierarchy Pelaporan:

- Weekly Report: Rapid response team (monitoring hoaks dan insiden)
- Monthly Report: Setiap OPD ke Dinas Kominfo (progress digitalisasi layanan)
- Quarterly Report: Dinas Kominfo ke Bupati (evaluasi triwulanan 3 target)
- Annual Report: Laporan publik tahunan (Indeks SPBE, Literasi Digital, Hoaks)

#### Format Laporan:

- Executive Summary: Ringkasan capaian, highlight, dan rekomendasi (2 halaman)
- Detail Analytics: Data lengkap, analisis tren, perbandingan dengan target
- Case Study: Success story dan lesson learned
- Action Plan: Rencana perbaikan untuk periode berikutnya

#### C.4.5.3. Mekanisme Evaluasi

## A. Self-Assessment (Evaluasi Mandiri):

- Setiap OPD melakukan evaluasi mandiri progress digitalisasi layanan
- Checklist dan kuesioner standar sesuai instrumen SPBE

## B. Internal Audit (Audit Internal):

- Tim audit Dinas Kominfo melakukan verifikasi progress setiap semester
- Dokumen review, interview, dan observasi lapangan

## C. External Audit (Evaluasi Eksternal):

- Evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB (2 tahun sekali)
- Survei literasi digital oleh lembaga independen (annual)
- Third-party assessment untuk objektifitas

#### D. Public Feedback:

- Survei kepuasan pengguna layanan digital (triwulanan)
- Focus Group Discussion dengan masyarakat (semester)
- Kanal pengaduan dan saran untuk perbaikan layanan

## C.4.5.4. Rapat Koordinasi dan Review

#### Frekuensi Rapat:

- Weekly: Tim rapid response hoaks, tim development aplikasi
- Monthly: Koordinasi seluruh OPD tentang progress digitalisasi
- Quarterly: Rapat evaluasi dengan Bupati dan Sekda
- Annual: Forum Transformasi Digital Kabupaten Kupang dengan stakeholder

## Agenda Rapat:

- Review capaian vs target
- Identifikasi hambatan dan problem solving
- Sharing best practice antar OPD
- Penetapan action plan periode berikutnya
- Penghargaan bagi OPD/individu berprestasi

#### C.4.5.5. Continuous Improvement

Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act):

- 1. Plan: Perencanaan program dan penetapan target
- 2. Do: Implementasi program sesuai rencana
- 3. Check: Monitoring, evaluasi, dan pengukuran capaian
- 4. Act: Perbaikan dan adjustment berdasarkan evaluasi

#### Innovation Lab:

- Unit khusus untuk eksperimen dan pilot project inovasi baru
- Fail fast, learn fast: budaya trial-error yang konstruktif
- Scaling up inovasi yang berhasil ke seluruh Kabupaten Kupang

#### C.4.6. Integrasi Ketiga Target Dengan Visi Kabupaten Kupang Emas

Ketiga target terukur ini saling mendukung dan terintegrasi dalam mewujudkan Visi "Kabupaten Kupang EMAS":

- 1. 90% Layanan Publik Digital (2028):
  - Meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kemudahan akses layanan
  - Mendorong transparansi dan akuntabilitas
  - Kontribusi langsung terhadap Indeks SPBE dan Reformasi Birokrasi
- 2. Penurunan Hoaks 40% per tahun:
  - Menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan masyarakat yang kritis
  - Mengurangi konflik sosial dan meningkatkan harmoni
  - Mendukung kemandirian masyarakat dalam mengelola informasi
- 3. Literasi Digital 80% Masyarakat (2029):
  - Meningkatkan kapasitas SDM yang adaptif terhadap era digital
  - Memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan digital
  - Mendorong kesejahteraan melalui pemanfaatan teknologi untuk produktivitas ekonomi

## Dampak Sinergis:

- Masyarakat yang literasi digital tinggi → pengguna aktif layanan digital → feedback untuk perbaikan layanan
- Layanan digital yang baik → meningkatkan trust terhadap info resmi → mengurangi hoaks
- Penurunan hoaks → masyarakat lebih percaya pada program digital → akselerasi

adopsi

Kontribusi terhadap Kesejahteraan:

- Peningkatan IPM dari 70 menjadi 75+ pada 2029
- Penurunan kemiskinan dari 28% menjadi 18% pada 2029
- Pertumbuhan ekonomi digital 7%+ per tahun
- Kabupaten Kupang menjadi rujukan transformasi digital di Indonesia Timur

## C.5. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Digital

Mendorong kegiatan *startup*, UMKM digital, dan ekonomi kreatif berbasis TIK untuk mendorong kemandirian dan inklusi.

## C.5.1. Latar Belakang dan Tujuan

Pengembangan startup, UMKM digital, dan ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi, inklusi sosial, dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Kupang. Dengan memanfaatkan potensi lokal—pariwisata, kerajinan, agroindustri—serta membangun ekosistem digital, pemerintah dapat mempercepat transformasi ekonomi menuju masyarakat yang produktif dan kreatif.

## Tujuan Utama:

- Memberdayakan pelaku UMKM dan startup untuk meningkatkan kapasitas digital dan akses pasar
- 2. Menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung lahirnya industri kreatif lokal berbasis TIK
- 3. Meningkatkan inklusi keuangan melalui digital payment dan platform fintech
- 4. Menghasilkan nilai tambah ekonomi lokal, mengurangi ketergantungan pada sektor primer

#### C.5.2. Strategi Pengembangan Startup dan UMKM Digital

## 1. Inkubasi dan Akselerasi Startup

- Program Kupang Digital Hub: Fasilitasi co-working space, office essentials, mentor network, dan akses internet cepat untuk startup lokal
- Inkubator dan Akselerator: Kerja sama dengan perguruan tinggi (UNDANA, Widya Mandira) dan swasta (Telkom, Google) untuk program inkubasi 6-12 bulan
- Modal Awal dan Hibah Teknologi: Skema hibah pemerintah daerah hingga Rp100 juta per startup tahap awal, dan soft loan bunga rendah dari BPD NTT

• Demo Day dan Investor Matching: Event tahunan mempertemukan startup dengan angel investor, venture capital, dan corporate partners

## 2. Digitalisasi UMKM Tradisional

- Pelatihan Digital Marketing & E-Commerce: Workshop berkala (Google Gapura, Facebook Blueprint) mencapai 5.000 pelaku UMKM dalam 3 tahun
- Onboarding ke Marketplace: Mitra resmi Tokopedia, Shopee, Bukalapak untuk memfasilitasi pendaftaran dan optimasi toko online; target 3.000 UMKM dalam 2 tahun
- Platform Lokal "KupangMart": Pembuatan marketplace kabupaten untuk produk khas (kopi, kerajinan, tenun ikat) dengan fitur delivery terintegrasi
- Digital Payment & Fintech: Kolaborasi dengan perbankan dan fintech seperti OVO, GoPay untuk edukasi dan cashback promosi UMKM

#### 3. Ekonomi Kreatif Berbasis TIK

- Creative Lab dan Maker Space: Ruang produksi konten digital (video, animasi, game,
   NFT) bekerjasama dengan sekolah seni dan kampus IT
- Festival Ekonomi Kreatif Digital: Event tahunan pameran startup, UMKM, gaming, esports, animasi; dorong brand lokal dan jaringan nasional
- Program "Kupang Content Creator": Pelatihan vlogging, podcasting, digital storytelling; bantu promosi budaya, pariwisata, kuliner lokal
- Pendanaan Crowdfunding Lokal: Platform crowdfunding komunitas untuk proyek kreatif, dengan pendampingan dari Dinas Kominfo dan komunitas startup

#### C.5.3. Output dan Outcome Terukur

Tabel 3 16 Output dan Outcome Terukur

Indikator	Baseline	Target	Target	Metode
	(2025)	2027	2029	Pengukuran
Jumlah startup terinkubasi	0	20	50	Laporan program inkubasi
Dana hibah/subsidy untuk startup (Rp miliar)	0	2	5	Rekapitulasi keuangan Dinas
UMKM digital aktif	500	2.500	5.000	Data pendaftaran marketplace
Omzet tahunan UMKM digital (Rp miliar)	5	25	50	Survei dan laporan marketplace

Jumlah konten ekonomi	0	200	500	Repository kreatif
kreatif (video, game, AR)				Dinas Kominfo
Peserta pelatihan digital	1.000	5.000	10.000	Data peserta dan
UMKM/startup				sertifikasi
Investasi swasta pada	0	10	30	Laporan investor
startup (Rp miliar)				matching
Keterjangkauan akses	0	3.000	8.000	Data kemitraan
modal fintech (jumlah)		UMKM	UMKM	fintech
Kepuasan peserta program	N/A	85	90	Survei pasca-
(%)				pelatihan

## Outcome Jangka Menengah dan Panjang:

- Kemandirian Ekonomi: Peningkatan pendapatan pelaku UMKM 50% pada 2029
- Lapangan Kerja Baru: 1.000 lapangan kerja di sektor startup dan kreatif pada 2029
- Inklusi Keuangan: 80% UMKM terlayani digital payment pada 2029
- Daya Saing Daerah: Kabupaten Kupang masuk Top 20 Inovasi Daerah berkembang nasional

#### C.5.4. Mekanisme Implementasi dan Kolaborasi

- 1. Pusat Layanan Startup & UMKM Digital di Dinas Kominfo: one-stop service untuk inkubasi, pelatihan, mentoring, dan perizinan usaha digital.
- 2. Kemitraan Perguruan Tinggi & Swasta: Modul pelatihan dikembangkan bersama kampus IT dan perusahaan teknologi, pendanaan CSR, serta akses lab dan riset.
- 3. Community Engagement: Pembentukan komunitas startup & UMKM digital di 24 kecamatan untuk peer-learning, sharing best practice, dan networking.
- 4. Regulasi Pendukung: Peraturan Bupati tentang insentif pajak daerah bagi startup dan UMKM digital serta kemudahan akses perizinan.
- 5. Monitoring & Evaluasi: Dashboard khusus memantau performa startup, UMKM digital, dan ekosistem ekonomi kreatif; triwulanan review oleh Tim Transformasi Digital.

#### C.5.5. Sinergi dengan Visi Kabupaten Kupang EMAS

 Kemandirian: Startup dan UMKM digital sebagai motor penggerak ekonomi lokal bebas ketergantungan impor

- Inklusi: Akses pelatihan dan pendanaan merata hingga desa, memberdayakan kelompok rentan
- Kesejahteraan: Peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dari 28% menjadi 18%
- Inovasi: Ekosistem kreatif mendorong Kabupaten Kupang sebagai pusat ekonomi digital di NTT

## **BAB IV. PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Transformasi digital di Kabupaten Kupang bukanlah sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Berdasarkan analisis, tantangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya literasi digital, dan sistem pemerintahan yang belum terintegrasi. Namun, terdapat peluang besar melalui dukungan program digitalisasi nasional dan potensi sumber daya manusia (SDM) muda.

Makalah ini menyimpulkan bahwa melalui implementasi **strategi terpadu dan kolaboratif**, Dinas Kominfo dapat memainkan peran sentral sebagai akselerator. Rencana strategis yang diusulkan mencakup tiga pilar utama:

- Digitalisasi Layanan Publik: Melalui penyusunan Arsitektur SPBE dan integrasi aplikasi, target 90% layanan publik dapat diakses digital pada tahun 2028, akan tercapai.
- 2. **Penurunan Hoaks:** Dengan sistem deteksi dini dan edukasi masif, penyebaran hoaks dapat ditekan hingga 40% per tahun.
- 3. **Peningkatan Literasi Digital:** Program pelatihan yang terstruktur akan meningkatkan literasi digital masyarakat hingga 80% pada tahun 2029.

Seluruh inisiatif ini dirancang untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif, sekaligus memberdayakan masyarakat dan ekonomi lokal. Dengan demikian, transformasi digital akan berkontribusi langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan, sejalan dengan visi "Kabupaten Kupang EMAS".

## B. Rekomendasi Kebijakan

Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan transformasi digital di Kabupaten Kupang, berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang strategis:

Pengesahan Peraturan Bupati tentang Arsitektur SPBE dan Satu Data Indonesia.
 Peraturan ini akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk integrasi sistem dan data,

- mencegah pengembangan aplikasi yang tumpang tindih, serta mendorong efisiensi anggaran dan interoperabilitas data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- 2. **Pembentukan Tim Koordinasi Transformasi Digital.** Tim ini harus dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan melibatkan seluruh Kepala OPD, serta difasilitasi oleh Dinas Kominfo. Tim ini bertugas untuk memastikan sinergi, monitoring, dan evaluasi berkala terhadap program digitalisasi, serta memastikan kepemilikan program (*ownership*) di setiap lini pemerintahan.
- 3. Pengalokasian Anggaran Khusus dan Insentif bagi Digitalisasi. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur TIK dan pengembangan aplikasi, serta memberikan insentif atau penghargaan bagi OPD yang berhasil mencapai target digitalisasi. Skema pendanaan melalui Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga dapat dijajaki untuk proyek-proyek infrastruktur besar.
- 4. **Penguatan Kolaborasi Multipihak.** Diskominfo harus proaktif menjalin kemitraan dengan kementerian/lembaga pusat untuk mendapatkan dukungan program dan insentif. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal dan swasta perlu ditingkatkan melalui skema magang, riset terapan, dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk meningkatkan kapasitas SDM dan mendorong inovasi.
- 5. Penyusunan Kurikulum Literasi Digital Masuk dalam Program Pendidikan. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan, literasi digital dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum lokal di sekolah-sekolah dan program pendidikan non-formal, untuk menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan era digital.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Kupang: BPS NTT.
- Dirjen Aptika Kominfo. (2022). *Peta Jalan Literasi Digital Indonesia 2022–2024*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2025). *Laporan Kinerja Program Aksesibilitas Jaringan dan Internet (BAKTI)*. Jakarta: Komdigi.
- Kementerian PANRB. (2024). Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024. Jakarta: KemenPANRB.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2023). *Modul Pelatihan Kepemimpinan Digital dan Tata Kelola Adaptif.* Jakarta: LAN RI.
- Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Peraturan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2022. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019. Satu Data Indonesia. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Ratminto. (2022). Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konsep SPBE dalam Konteks Indonesia Timur. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rizaldi, A. & Budiarti, H. (2024). *Strategi Mitigasi Hoaks dan Kepercayaan Publik di Era Digital*. Jurnal Ilmu Komunikasi Pembangunan, 18(2).
- United Nations (UN). (2020). E-Government Survey 2020: Digital Government in the Time of Pandemic. New York: United Nations Publication.